



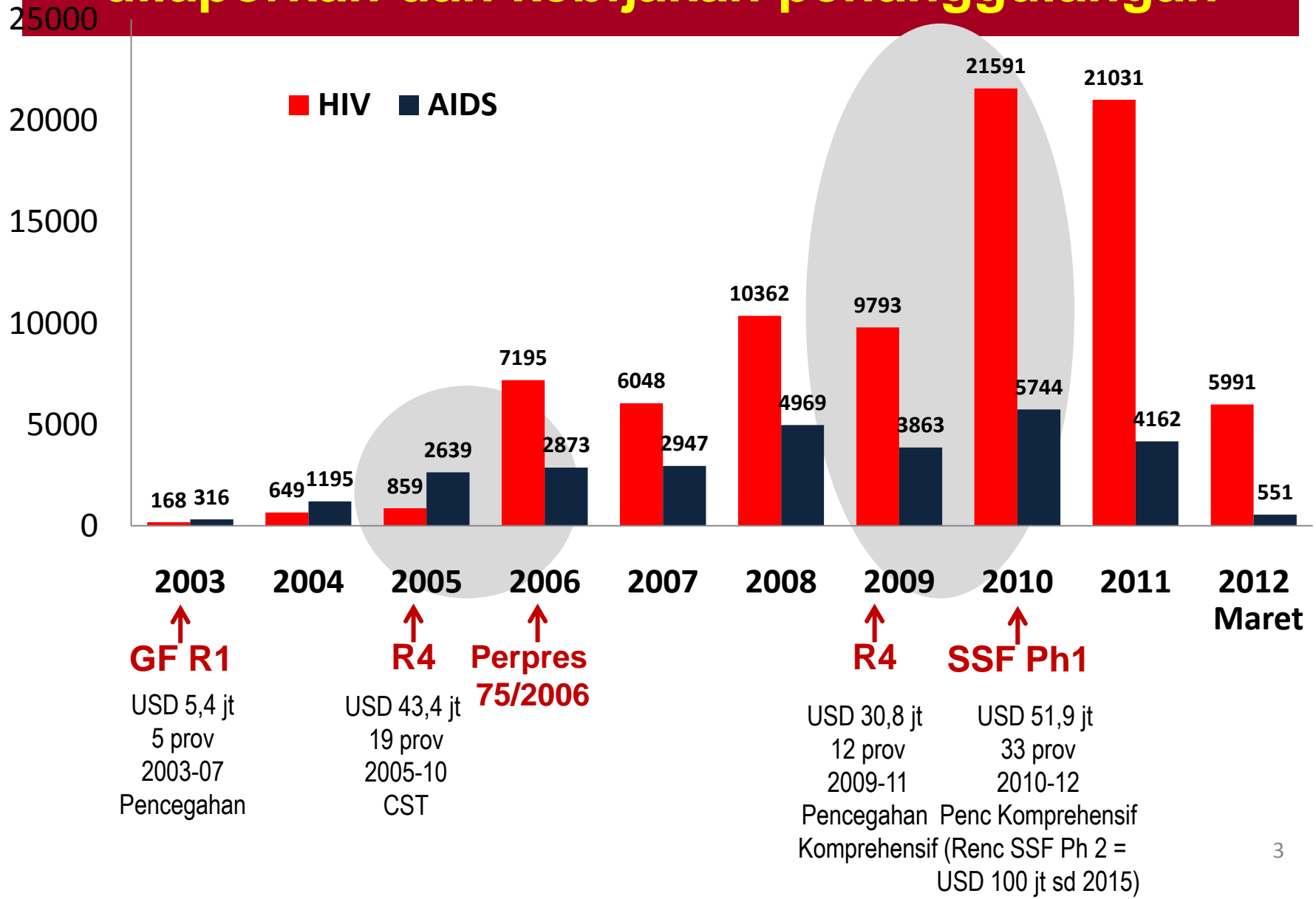
# Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS: Masa Lalu, Saat ini dan Masa Mendatang

Dr. Kemal N. Siregar, Sekretaris KPAN  
2012

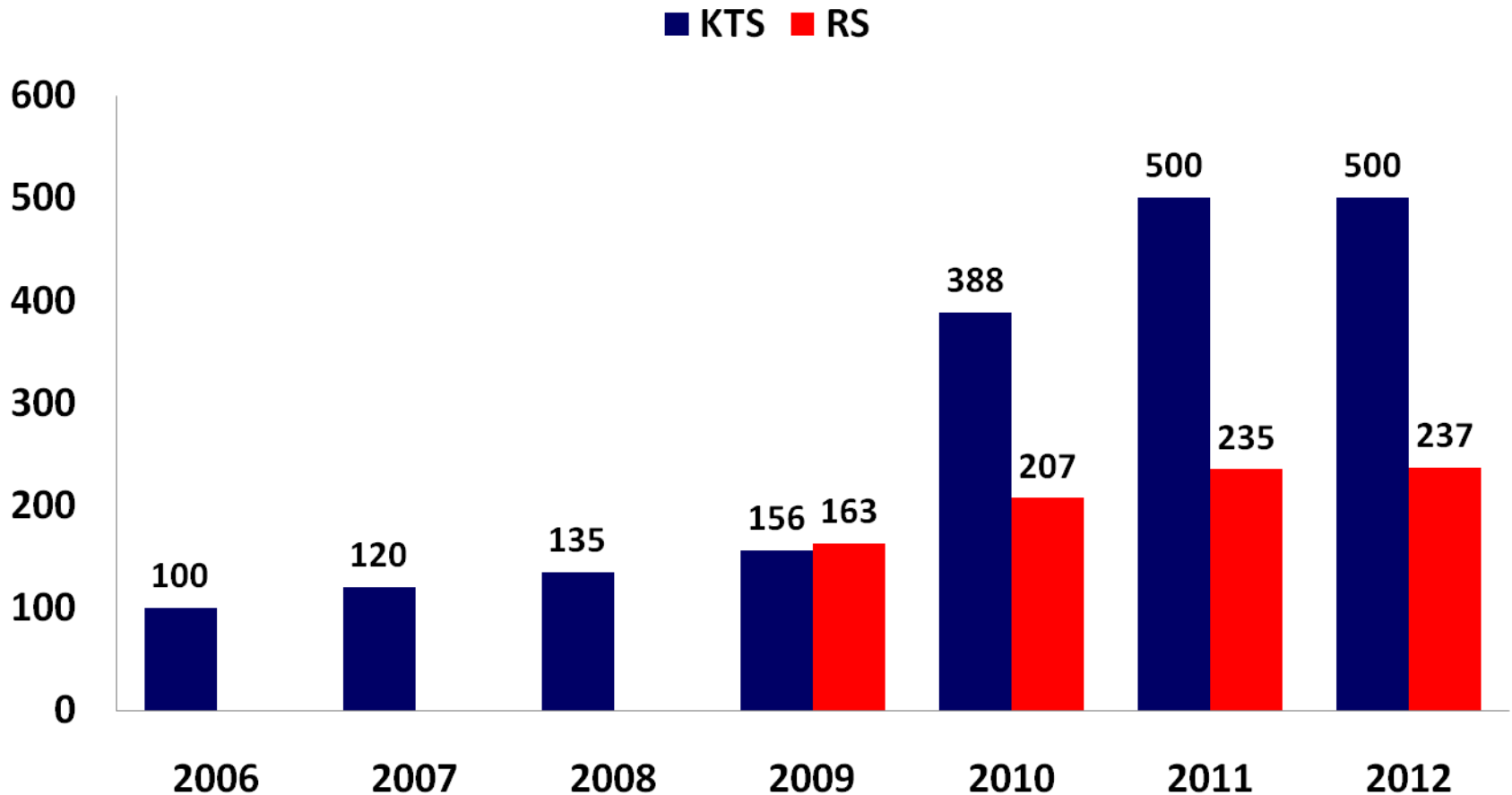
# Pokok bahasan

- Situasi epidemi:  
Tren kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan dan kebijakan penanggulangan
- Dampak kebijakan saat ini:
  - Terhadap program?
  - Epidemi?
- Kebijakan masa mendatang:
  - Tantangan?
  - Arah?

# Situasi epidemi: Tren kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan dan kebijakan penanggulangan



# Perkembangan jumlah layanan Konseling Testing Sukarela (KTS) dan Rumah Sakit (RS) rujukan, 2006-2012



**Dampak kebijakan saat ini:  
Terhadap program? Pandemi?**



Figure 5.2: Shifts in political leadership on AIDS

Source: Asia-Pacific Leadership Forum (2006), 'Background Study on Leadership in the Region' (unpublished), presented at the Asia-Pacific Leadership Forum Steering Committee Meeting, April 2007.

# Perkembangan kebijakan 2006-2011,

untuk pencegahan HIV pada Penasun (1)

- **2006:**
  - **Perpres No 75 ttg KPAN (kemudian Permendagri 20/2007): Anggota semua sektor, pem & non-pem terut komunitas**
  - Kepmenkes No 567 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza)
- **2007:** Permenkokesra No 2 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Pengg Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik
- **2008:** Kepmenkes No 350 ttg Penetapan RS Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadon serta Pedoman PTRM
- **2009:** UU RI No 35 tentang Narkotika – jaminan upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah-guna dan pecandu narkotika.

# Perkembangan kebijakan 2006-2011, untuk pencegahan HIV pada Penasun (2)

- **2010:** SE Mahkamah Agung No 4 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (+ SEMA 3/2011)
- **2011:** PP 25 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor. Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kepmenkes RI Nomor 1305/Menkes/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Kepmenkes RI No. 2171/Menkes/SK/X/2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika .
- **2012:** Permensos No 3 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan dan Zat Adiktif Lainnya

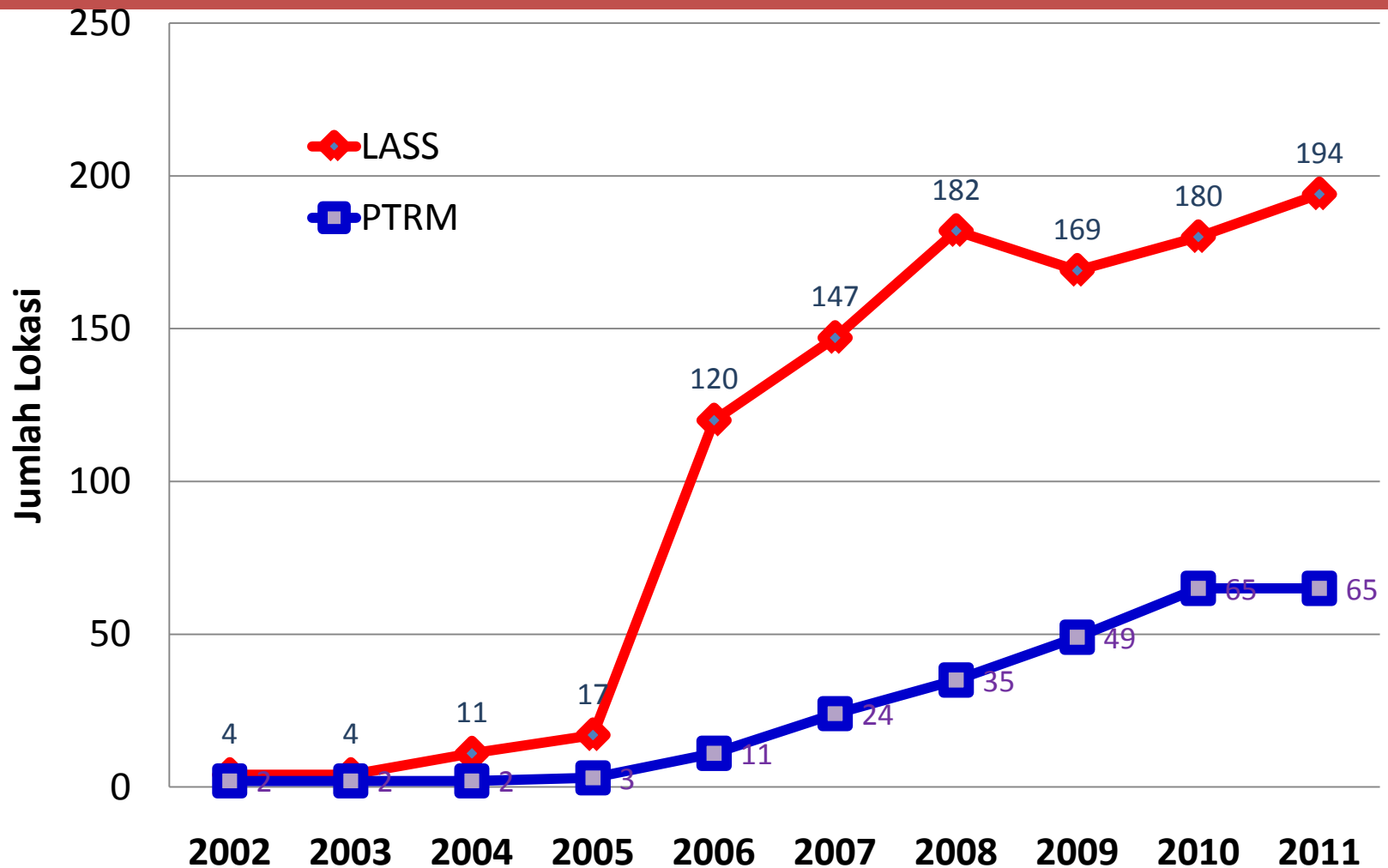


# Perkembangan kebijakan 2006-2010, untuk pencegahan HIV pada Penasun (3)

**Kebijakan berperan menunjang pelaksanaan program pencegahan HIV pada Penasun, meliputi aspek berikut:**

- **Kebijakan kelembagaan** sebagai landasan pengelolaan program nasional sampai tingkat daerah (Perpres 75/2006, Permendagri 20/2007)
- **Kebijakan program nasional**, yang komprehensif mulai dari komunitas, layanan dasar dan rujukan, menjadi acuan semua sektor (pemerintah dan masyarakat) untuk mengembangkan berbagai program dan layanan kepada Penasun (Permenkokesra 2/2007)
- **Kebijakan layanan** sebagai landasan pembentukan pusat-pusat layanan dan pedoman teknis pelaksanaan layanan (Kepmenkes 567/2006, 350/2008, dll, Permensos 3/2012)
- **Kebijakan dekriminalisasi Penasun** sebagai dasar yang menjamin Penasun untuk mendapatkan layanan (UU 35/2009, SEMA 4/2010, SEMA 3/2011, PP 25/2011)

# Dampak kebijakan: Pertambahan layanan pengurangan dampak buruk di Indonesia 2002 - 2011



## Dampak kebijakan: Perkembangan prevalensi HIV (%) pada populasi kunci, 2007-2011

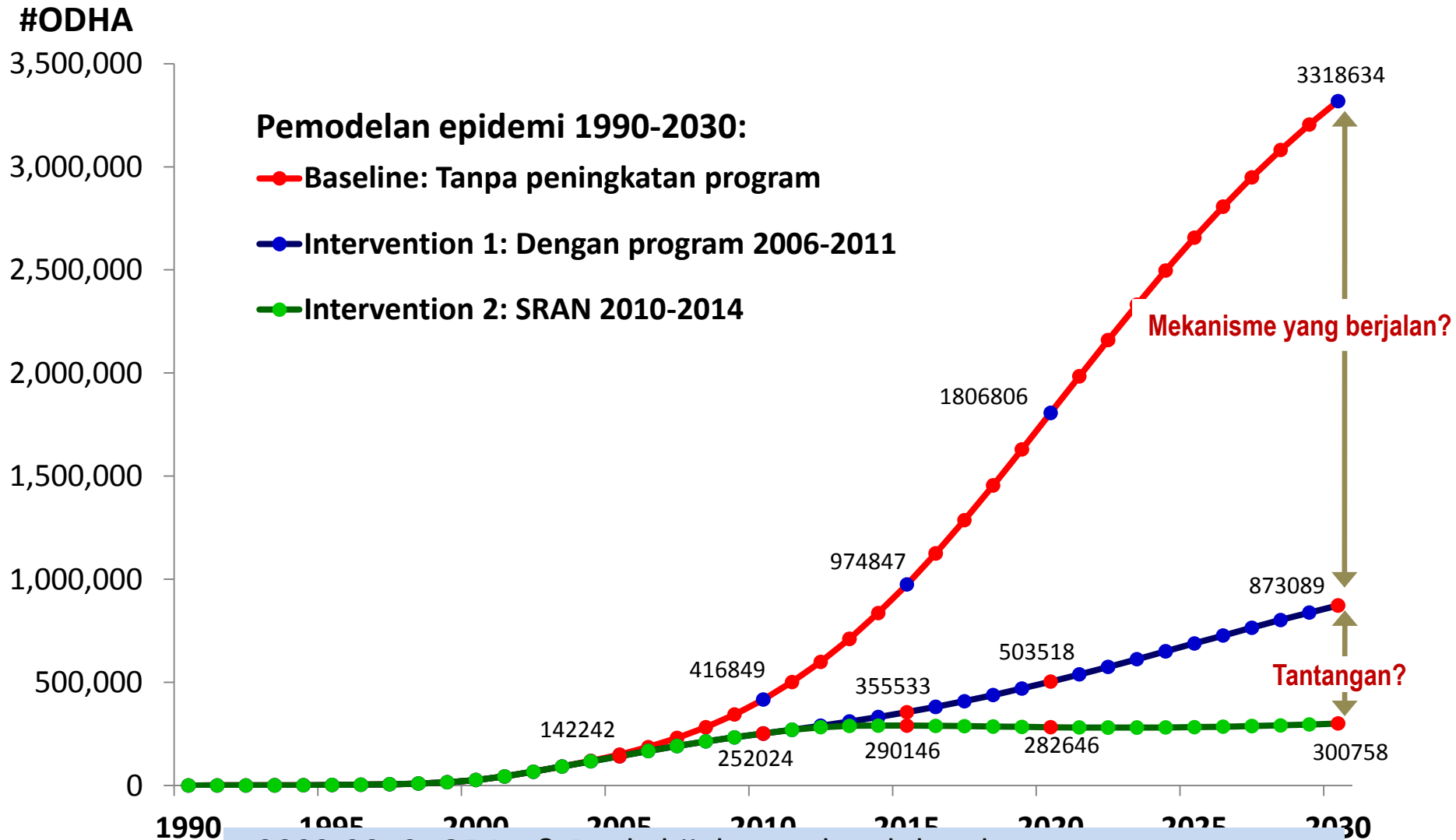
Populasi kunci	2007	2011	Arah perkembangan
Penasun	52,4	42,4	Menurun
WPS Tak Lgs	4	3,1	Menurun
WPS Langsung	9,8	9,3	Menurun, sedikit
Waria	24,3	23,2	Menurun, sedikit
LSL	5,3	12,4	Meningkat, > 2x
Pria risti	0,1	0,7	Meningkat, 7x

Sumber: STBP 2007 dan 2011, Kemenkes

Catatan: Data dibandingkan dari lokasi yang sama

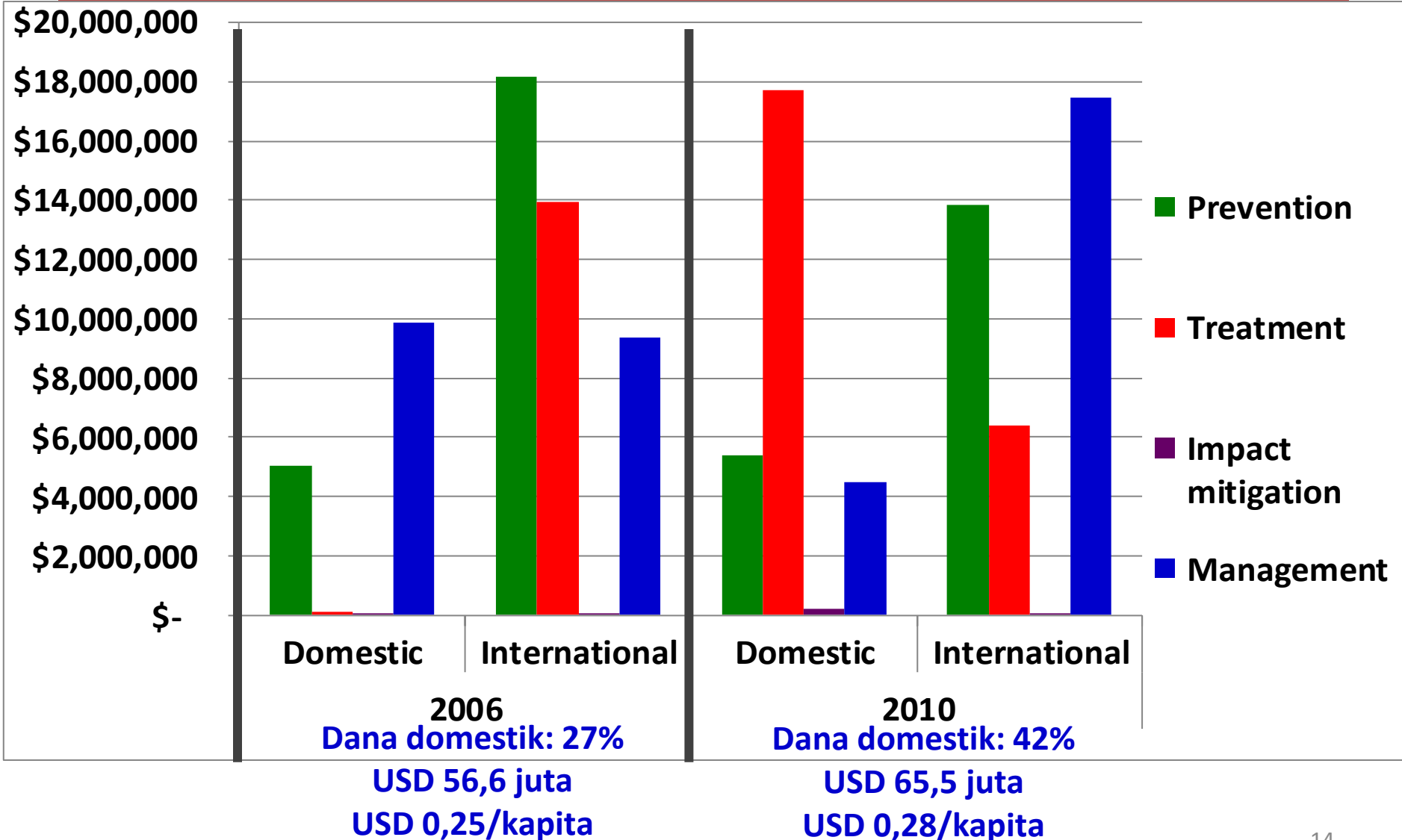
**Kebijakan masa mendatang:  
Tantangan? Arah?**

# Apakah epidemi HIV sudah terkendali?

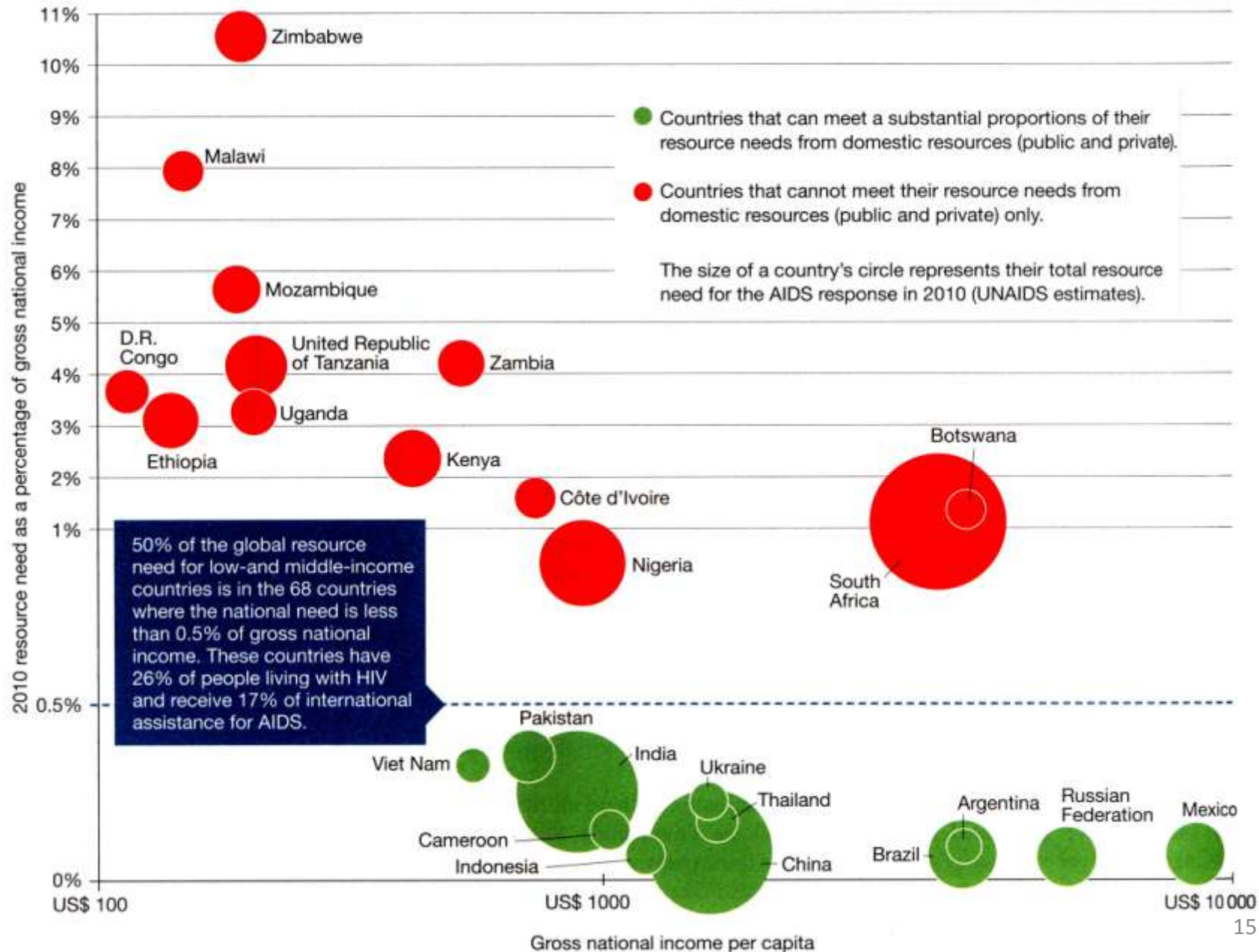


- 2003-2010: GF R1 & R4, kebijakan terkotak-kotak
- 2006: Perpres 75, kebijakan terkoordinasi
- 2009-2012: GF R8 & SSF Ph 1, kebijakan pencegahan komprehensif

# Tantangan: Tren pembelanjaan HIV dan AIDS, 2006 and 2010



# Who can bear the resource burden of the AIDS response?



# Arah kebijakan masa mendatang

- **Masa lalu: Terkotak-kotak**

Belum multipihak, wilayah terbatas, layanan terbatas, cakupan program rendah

- **Saat ini: Terkoordinasi**

Multipihak (pemerintah dan non pemerintah, CSO), pelibatan populasi kunci, pencegahan komprehensif, wilayah prioritas, layanan meningkat, peningkatan cakupan program, mulai berdampak pada epidemi

- **Masa mendatang: Terintegrasi**

Plus perhatian pada transmisi seksual, terintegrasi dalam sistem baik kesehatan maupun komunitas, jaminan sosial, peningkatan peran sektor swasta